BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kriteria tindakan akuisisi yang terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 20223, yaitu akuisisi yang telah memenuhi batasan nilai aset atau penjualan, terjadi perubahan pengendalian, bukan transaksi antar pelaku usaha terafiliasi, dan transaksi antar pelaku usaha yang memiliki aset dan/atau penjualan di Indonesia, mengakibatkan peningkatan kemampuan penguasaan atas suatu pasar tertentu oleh pelaku usaha yang melakukan pengambilalihan aset, dan tidak termasuk transaksi pengambilalihan aset yang dikecualikan. Jika pelaku usaha memenuhi kriteria-kriteria tadi, maka hal tersebut akan menimbulkan wajib notifikasi kepada KPPU karena dianggap berpotensi melakukan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu penguasaan pasar, posisi dominan, monopoli, dan persekongkolan. Dalam kasus PT Lestari Gemilang Intisawit, perusahaan ini telah memenuhi seluruh kriteria tadi dan mendapatkan kewajiban notifikasi karena memiliki potensi melakukan persaingan usaha tidak sehat lewat akuisisi mayoritas saham PT Nabati Agro Subur.

2. Akibat Hukum Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Nabati Agro Subur oleh PT Lestari Gemilang Intisawit adalah dikenakan denda keterlambatan pemberitahuan akuisisi berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PT Gemilang Lestari Intisawit yang mengakuisisi PT Nabati Agro Subur Mengira tidak perlu dilakukan pemberitahuan atas pengambilalihan saham tersebut. Padahal, PT Gemilang Lestari Intisawit merupakan anak perusahaan dari PT Bumitama yang setelah melakukan akuisisi mengakibatkan kelebihan atas nilai aset dan nilai penjualan pada PT Bumitama. Hal ini tidak menjadi alasan ketidaktahuan terlapor sebagai pembelaan telah melakukan notifikasi atas pengambilalihan saham kepada KPPU. Dalam putusan Perkara Nomor 5/KPPU-M/2022, sebelum mengenakan denda administrasi, terlapor melakukan kesalahan penafsiran tentang ketentuan pelaporan pengambilalihan saham kepada KPPU. Objektivitas putusan ini cenderung memberikan keringanan hukuman terhadap terlapor sehingga tidak berdampak positif atas penenaan denda yang dikenakan oleh terlapor sebesar 1 (satu) miliar rupiah, hakim seharusnya memberikan penilaian yang lebih menggunakan common sense dengan mengikuti aturan yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 untuk memberikan denda maksimal sebesar 25 (dua puluh lima miliar) rupiah kepada PT Gemilang Lestari Intisawati karena telah terlambat selama 1.361 (seribu tiga ratus enam puluh satu) hari kerja. Penjatuhan hukuman yang

83 lebih rendah dengan alasan sopan santun dan kooperatif malah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kasus ini.

B. Saran

1. Sebagai Lembaga, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak hanya memutuskan kasus berdasarkan aturan dan pedoman yang berlaku saja, tetapi juga *common sense* berdasarkan penilaian objektif sebagai lembaga yang menjaga iklim usaha di Indonesia, hal ini agar perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi nantinya tidak akan menjadikan keputusan ini sebagai celah untuk melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi melakukan persaingan usaha tidak sehat.
2. KPPU sebaiknya mempermudah proses notifikasi agar perusahaan-perusahaan yang akan melakukan akuisisi di masa depan dapat dengan mudah melakukan notifikasi. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat aplikasi berbasis website untuk memudahkan perusahaan melakukan pelaporan secara online di manapun dan kapan pun, atau petugas yang mendatangi perusahaan yang melakukan akuisisi setelah beberapa hari untuk mengingatkan agar melakukan pemberitahuan akuisisi kepada KPPU. Dengan menciptakan sebuah sistem dalam proses notifikasi, diharapkan di masa depan perusahaan-perusahaan yang melakukan akuisisi dapat melakukan prosedur akuisisi dengan tertib dan mudah